

<i>Doc Name</i>	Dua Pilar E-Government : <i>Political Encourage</i> dan <i>Human Resources</i>
<i>Reference</i>	Apkomindo, IT-Corner Tribun Kaltim
<i>Date</i>	May, 2004
<i>Status</i>	<b><i>DRAFT – PUBLIC READABLE</i></b>
<i>Version</i>	1a
<i>Author</i>	Anton Rahmadi, S.Tp – Konsultan TI
<i>Editor</i>	

**Penggunaan Teknologi Informasi;**  
**E-Government : *Political Encourage* dan *Human Resources***  
 Oleh Anton Rahmadi  
 Konsultan TI

Hari Kartini, 20 April 2004, diperingati dengan cara yang berbeda oleh BKD Propinsi Kalimantan Timur. Untuk pertama kalinya sebuah instansi pemerintahan menggelar lomba penguasaan komputer dan teknologi informasi di kalangan pegawainya sendiri. Lomba ini terdiri dari kemampuan mengetik surat dengan *Microsoft Word*, membuat tabel dan formulasi dengan *Microsoft Excel*, presentasi dengan *Microsoft PowerPoint*, dan lomba komunikasi dengan *Microsoft NetMeeting*, serta lomba internet terdiri dari browsing, mencari data, dan mengoperasikan email. Gagasan utama dari lomba ini ternyata untuk mengetahui tingkat penguasaan penggunaan komputer yang menunjang pekerjaan sehari-hari.

Sebagaimana diketahui, tingkat penguasaan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan pemerintahan disinyalir sangat rendah. Barang-barang canggih yang diadakan sering kali hanya menjadi pajangan, bahkan ada pegawai yang buta sama sekali terhadap perangkat-perangkat TI. Sebagai contoh, disebuah instansi lainnya, perangkat konsentrator (switch/hub), sering kali dicabut catu dayanya, akibatnya seluruh jaringan tidak berfungsi. Bahkan, sering kali komputer yang ada hanya berisi *games* dan proses pengetikan masih sebagian besar menggunakan mesin ketik.

Masalah sumber daya manusia (*human resources*) “melek TI” ini bukan hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi sudah menggejala di Indonesia. Secara umum, rendahnya kualitas TI di kalangan pegawai pemerintahan dikarenakan oleh 3 faktor utama, yaitu rendahnya efisiensi, produktivitas, dan upaya meningkatkan pengetahuan. Faktor pertama dan kedua memang merupakan penyakit yang “akut sekaligus kronis” di

lingkungan pemerintahan. Jumlah tenaga kerja yang jauh lebih besar dari *load* kerja, sistem rekrutmen yang masih menganut asas “bubuhan” dan lebih berdasar ke *like/dislike* serta “gizi penunjang”, menjadikan efisiensi dan produktivitas sebagai bom waktu bagi pemerintahan itu sendiri.

Tetapi, faktor ketiga, rendahnya upaya meningkatkan pengetahuan, memegang peranan yang sangat penting dalam ketertinggalan penguasaan TI di kalangan pegawai pemerintahan. Dilain sisi, beberapa pegawai yang antusias untuk mengembangkan pengetahuannya juga tidak tahu harus melalui jalur apa, karena fasilitas yang disediakan cukup minim. Sebagai contoh, sebuah instansi di sebuah kabupaten di Sulawesi, hanya memiliki dua sampai empat orang pegawai yang dapat menggunakan komputer, dan statusnya pun ternyata bukan pegawai tetap (PTT). Sementara pegawai-pegawai seniornya cenderung tidak mau tahu tentang komputer dan tidak mau belajar menggunakannya.

Fasilitas yang diberikan oleh pengambil kebijakan juga memegang peranan penting, pengiriman staf yang tidak sesuai kapasitasnya ke pelatihan-pelatihan di luar kota menjadi tidak efektif dan cenderung dianggap kesempatan “jalan-jalan” gratis. Buku-buku yang sesuai, misalnya panduan program yang menunjang pekerjaan sehari-hari juga harus dibeli sendiri oleh pegawai yang notabene gajinya hanya cukup untuk dapur. Perhatian pengambil kebijakan ini merupakan salah satu pilar eksternal suksesnya e-government, yaitu *political encourage*.

Salah satu fasilitas yang layak diwujudkan adalah adanya pusat training TI (IT Center), yang bertujuan sebagai medium penggodokan pegawai disertai standar tertentu untuk lebih meningkatkan produktivitas dengan menggunakan perangkat komputer/teknologi informasi yang tepat guna bukan sekedar mahal dan canggih. Upaya lainnya adalah menempatkan personil pegawai yang mengerti TI dalam sebuah struktur tertentu yang diatur oleh perda, sehingga penggajian, tunjangan, dan *job description*-nya jelas.

Tentu saja, sekali lagi faktor yang menentukan adalah *political encourage* yang mendukung perkembangan TI. Untuk Propinsi Kalimantan Timur, agaknya pengambil kebijakan sudah memiliki komitmen yang baik, hanya saja perlu diimplementasikan di lapangan.

Bagi para pelaku TI, peningkatan SDM di instansi pemerintahan bisa menjadi lahan “bisnis” bagi para anggota Apkomindo Kaltim, khususnya yang bergerak dibidang pelatihan, selain itu, efek dominonya adalah kebutuhan akan perangkat komputer/TI yang lain meningkat, karena jumlah masyarakat yang “melek TI” semakin bertambah. Peranan pengusaha lokal akan meningkat, karena faktor geografis, kedekatan, serta relasi yang baik akan menyebabkan proyek-proyek TI di Kalimantan Timur dikerjakan oleh pengusaha lokal dengan catatan, mutu dan kualitas tentunya menjadi hal yang utama.

Kembali ke lomba, yang menarik adalah, peserta yang ikut dalam satu jenis lomba tidak boleh ikut jenis lomba yang lain, artinya sebuah bidang harus menurunkan 5 orang “jago” komputernya. Sementara jumlah bidang ada 5, sehingga peserta yang ikut jika dijumlah adalah 25 orang. Artinya, hampir 50 % dari total pegawai instansi tersebut harus menunjukkan kemampuannya di bidang komputer/TI. Beberapa pengamat/konsultan TI yang diundang sebagai juri independen mengaku sangat susah mencari pemenang, dikarenakan tingkat penguasaan yang cukup merata, dan antara peserta lomba, rata-rata sudah mahir dalam mengoperasikan komputer untuk kebutuhan sehari-hari. Alangkah baiknya langkah yang dilakukan instansi ini dapat pula diikuti oleh instansi lainnya, artinya, klaim penguasaan akan komputer/TI untuk keperluan sehari-hari betul-betul dapat dipertanggungjawabkan.

Pertanyaannya, mengapa instansi seperti BKD Propinsi Kaltim begitu gencar melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilingkungan instansinya ? Tidak lain karena akan diluncurkannya website dengan salah satu program utamanya adalah *self assesment* pegawai, yaitu setiap pegawai dapat langsung mengakses data pribadinya masing-masing, dan melaporkan dengan segera ke instansi terkait jika ada perubahan. Fasilitas yang diberikan oleh instansi ini merupakan fasilitas pertama yang dimiliki oleh badan kepegawaian di seluruh Indonesia. Untuk itu masyarakat TI Kalimantan Timur boleh berbangga.